PERPUSTAKAAN KPK
No. Induk : 220200353
No. Panggil : A KSK
Perpustakaan KPK Komisi Pemberantasan Korupsi
tautan utama pengetahuan anti korupsi

Herman Hery dan Ihsan Yunus, dua politikus PDI Perjuangan, sudah lama disebut dalam **kasus korupsi bantuan sosial Covid-19. Ada jejaknya di gudang Kelapa Gading.**

PENYIDIKAN korupsi paket bantuan sosial Covid-19 tepat setahun berjalan pada awal Desember 2021. Empat pejabat, termasuk Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, sudah mendekam di penjara karena terbukti menerima suap Rp 32,5 miliar. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi belum mengembangkannya ke tokoh lain, meski dua politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Herman Hery dan Ihsan Yunus, santer disebut terlibat.

Di awal penyelidikan, komisioner KPK berjanji mengungkap semua aktor yang menggangsir proyek senilai Rp 6,8 triliun itu. Nyatanya, penyidikannya jalan di tempat, bahkan KPK tak kunjung meminta masukan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung nilai kerugian negara.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengakui penyelidikan lanjutan kasus paket bantuan sosial yang mengarah kepada Herman Hery dan Ihsan Yunus masih jalan di tempat. "Kami belum meminta penghitungan kerugian negara terkait dengan penyelidikan HH dan IY," tutur Alexander, menyebut inisial keduanya pada Kamis, 25 November lalu. "Kami akan minta setelah perkaranya naik ke penyidikan."

Alexander beralasan BPKP tak akan menghitung kerugian negara sebuah perkara korupsi jika pengusutannya masih dalam tahap penyelidikan. Artinya, belum ada tersangka. Ia mengklaim lembaganya sudah mengantongi audit BPKP terdahulu, yakni program pengawalan belanja penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Menurut Alexander, BPKP menemukan selisih harga antara yang diajukan perusahaan penyedia paket bantuan sosial dan dana yang dibayarkan Kementerian Sosial. "Kalau sudah dibayar, perusahaan harus mengembalikan selisih pembayaran itu ke negara," katanya. Namun audit BPKP tersebut hanya mencakup pelaksanaan pemberian paket bantuan sosial kepada masyarakat, bukan pengadaannya. Sementara itu, Herman dan Ihsan diduga terlibat dalam tahap pengadaan paket bantuan sosial ini.

Dugaan keterlibatan Herman Hery dan Ihsan Yunus terungkap saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono pada 4 Desember 2020. Keduanya sedang bertemu dengan dua pejabat dari perusahaan penyedia bantuan. Di situ, dua pejabat itu diduga sedang menerima suap atas imbalan memberikan kuota paket bantuan penanggulangan Covid-19 di Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi.

Menurut temuan KPK, kedua pejabat Kementerian Sosial itu mengutip Rp 10 ribu per paket. Jumlah paket bantuan sebanyak 1,5 juta. Uang kutipan itu lalu mengalir kepada Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Wakil Bendahara Umum PDI Perjuangan. Pada 24 Agustus lalu, hakim memvonis Juliari 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta serta menyediakan uang pengganti Rp 14,5 miliar karena terbukti menerima suap Rp 32,5 miliar.

Dua orang dari perusahaan penyedia paket bantuan itu adalah Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry van Sidabukke. Me-

1

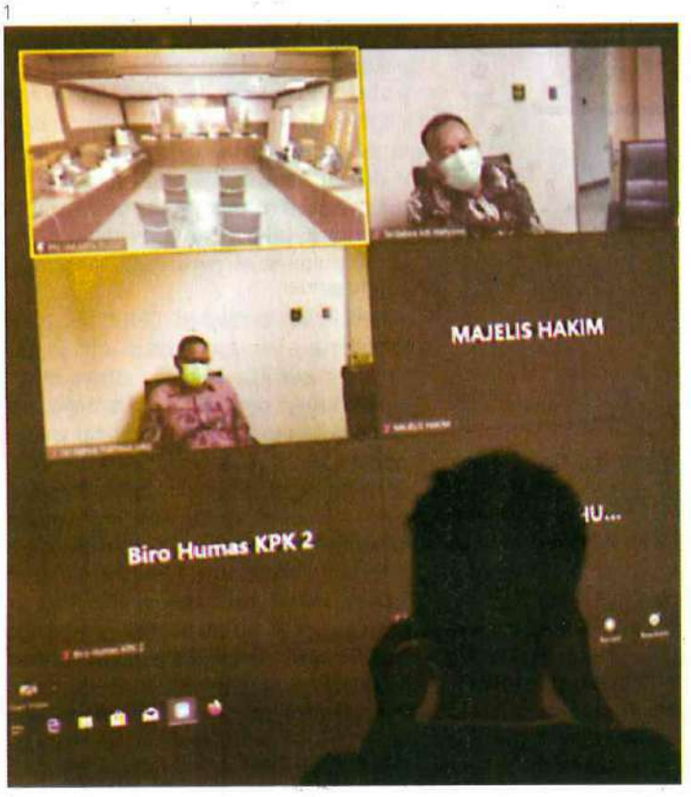

2

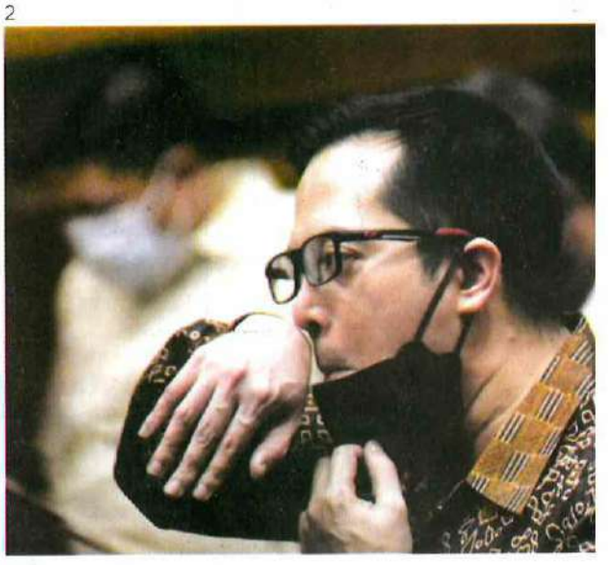

1. Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono (kanan atas) mengikuti sidang pembacaan surat tuntutan secara daring Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 13 Agustus 2021.

2. Ihsan Yunus.

TEMPO/IMAM SUKAMTO (MATHEUS, IHSAN, KPK)

reka sedang menghadapi sidang vonis dengan tuduhan pemberian suap kepada Joko dan Adi.

Selain menerima suap dan menyunat harga paket bantuan sosial Covid-19, menurut hakim, Juliari menunjuk secara langsung sejumlah perusahaan dalam pengadaan bantuan sosial. Padahal, menurut para hakim, perusahaan-perusahaan ini tak memenuhi kualifikasi sebagai perusahaan penyedia paket bantuan sosial.

Majelis hakim bahkan terang-terangan menyatakan ragu terhadap perusahaan Herman Hery, Grup Dwimukti Graha Elektrindo, sebagai salah satu kontraktor paket bantuan sosial. "Sebab, Dwimukti Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik," ujar Joko Subagyo, anggota majelis hakim pengadil Juliari, saat membacakan putusan.

Selain PT Dwimukti, ada PT Anomali Lumbung Artha dan empat perusahaan lain yang tercatat menjadi kontraktor pengadaan paket bantuan sosial. Mereka terafiliasi ke Grup Dwimukti Graha Elektrindo. Proyek yang mereka kerjakan senilai Rp 2,1 triliun dan terdiri atas 7,6 juta paket bantuan sosial Covid-19.

Seorang sumber yang berada dalam pusaran korupsi itu mengatakan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Herman Hery membeli bahan bantuan sosial dengan keuntungan tinggi karena harganya melalui empat lapis perusahaan. Padahal perusahaan yang ditunjuk bisa langsung membeli bahan bantuan kepada perusahaan pemasok. "Akibatnya, keuntungan perusahaan penyedia mencapai Rp 300 miliar," ucap sumber ini. "Jumlah itu belum seluruhnya."

Ketika bersaksi untuk Juliari pada 14 Juni lalu, mantan direktur PT Dwimukti Graha Elektrindo, Ivo Wongkaren, mengakui bahwa pengurus perusahaan-perusahaan penyedia paket bantuan itu adalah anak, istri, dan saudara Herman Hery. Saat perusahaan mendistribusikan paket bantuan itu pada April-November 2020, Ivo mengaku sudah tak lagi menjabat direktur.

Ivo mengaku menjadi direktur di perusahaan Herman Hery yang lain, yakni PT Anomali Lumbung Artha. "Saya tidak menjadi pengurus di PT Dwimukti saat bantuan sosial, tapi saya direktur di salah satu perusahaan beliau. Saya yang bawa usul ini ke PT Dwimukti grup untuk membiayai PT Anomali," ujar Ivo.

PT Anomali Lumbung Artha memperoleh kuota proyek bantuan sosial sebanyak 1.506.900 paket. Aslinya, Ivo mengakui, PT Anomali adalah perusahaan elektronik se hingga tidak memiliki pengalaman menye diakan bahan pokok.

Afiliasi PT Anomali Lumbung Artha lain adalah PT Famindo Meta Komunika, yan mendapat kuota penyaluran bantuan 1,2 juta paket, dan PT Junatama Foodia Krea sindo dengan 1,61 juta paket. Ada pula P Tara Optima Primago yang memperolel kuota 250 ribu paket.

Dalam persidangan juga terungkap bah wa Ivo Wongkaren dan Herman Hery pe nah mengajukan keberatan kepada Ke menterian Sosial karena jatah kuota P Anomali Lumbung Artha sempat akan di turunkan.

Pengurangan kuota paket bantuan jug pernah hendak diterapkan kepada P Mandala Hamonangan Sude. Ini perusa haan yang menyeret Ihsan Yunus, koleg Herman Hery dan Juliari Batubara di PD Perjuangan. Adalah Matheus Joko, sebaga pejabat pembuat komitmen, yang henda memotong kuota perusahaan ini menjad 100 ribu paket.

Joko mengaku didatangi oleh Agustri Yo gasmara yang memprotes rencana pemo tongan kuota itu. Agustri tak lain orang su ruhan Ihsan. Melalui Agustri, Ihsan Yunu menyalurkan 4,5 juta paket senilai Rp 1,

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata (kanan) dan Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto di gedung KPK, Jakarta, 24 Agustus 2021.

triliun. Namun mereka tak langsung menyalurkan paket bantuan, melainkan mendistribusikannya kepada perusahaan lain.

KPK sebenarnya tak sulit menelusuri jejak "kerja sama" Juliari dan Ihsan Yunus. Saat awal Covid-19 masuk ke Indonesia pada Maret 2020, Juliari sudah melibatkannya. Kala itu, Ihsan masih menjabat Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat yang bermitra dengan Kementerian Sosial.

Dia mendapat jatah paket pengadaan alat pelindung diri, cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*), masker, vitamin, dan madu. Nilai kontraknya lebih dari Rp 50 miliar. Ihsan diduga juga mengerjakan program pengadaan paket bahan kebutuhan pokok alias sembako "Kemensos Hadir" dengan harga per paket Rp 200 ribu.

Saat bersaksi dalam persidangan Juliari pada 21 Juni lalu, Ihsan mengklaim tak tahu paket bantuan sosial yang disebut disalurkan melalui Agustri Yogasmara. "Tidak tahu," kata Ihsan, singkat.

Segendang-sepenarian dengan Ihsan, Herman Hery mengatakan tak ikut campur dalam penyaluran paket bantuan sosial oleh PT Dwimukti Graha Elektrindo dan perusahaan afiliasinya. Politikus asal Nusa Tenggara Timur itu mengklaim perusahaan tersebut diurus istrinya, Vonny Kristiani, dan anaknya, Stevano Rizki Adranacus. "Kalau orang mau menarik-narik saya, apa salah saya?" tutur Herman.

Ia juga menepis tudingan menitipkan perusahaannya kepada Juliari hingga kerap menerima proyek Kementerian Sosial. "Itu hanya isapan jempol. Harus ditanya dari mana datanya," ujarnya.

Penyidik KPK sudah memanggil Herman Hery untuk meminta konfirmasi atas semua cerita itu pada April lalu. Kepada penyidik, dia juga menampik tudingan *cawe-cawe* dalam penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial.

Pengacara Juliari, Yanuar Wasesa, mengatakan kliennya tak pernah bercerita ihwal keterlibatan Herman Hery dan Ihsan Yunus dalam penyaluran paket bantuan sosial Covid-19. "Apalagi setelah putusan saya tidak lagi menjadi pengacara Pak Juliari," katanya. "Jadi tidak bisa mewakili Pak Juliari memberikan tanggapan."

Rupanya, penyelidikan korupsi bantuan sosial jalan terus. Ada info bahwa sejumlah penyidik KPK menggeledah semua kantor unit bisnis Herman Hery pada Selasa, 23 November lalu. Mereka mendatangi salah satu kantor Herman di Panin Tower, kawasan Senayan, Jakarta Pusat, sekitar pukul 14.00. "Info yang beredar begitu, tapi saya tidak tahu kebenarannya," ucap Yanuar Wasesa pada Sabtu, 27 November lalu.

Seorang petugas mengkonfirmasi kabar penggeledahan itu. Menurut dia, penyidik KPK dari bagian penindakan tengah memburu seseorang yang diduga menjadi perantara penyerahan uang komisi alias *kickback* paket bantuan sosial Covid-19 yang dikerjakan perusahaan Herman Hery.

Para penyidik, kata sumber ini, tak menemukan sang perantara di sana. Para pegawai kantor yang didatangi KPK buang badan. Mereka mengaku tak mengetahui keberadaan saksi kunci tersebut.

Alexander Marwata mengkonfirmasi kabar anak buahnya telah menggeledah kantor Herman Hery serta Ihsan Yunus untuk menebalkan bukti-bukti yang telah dikantongi timnya, tapi menolak menjelaskan penggeledahan pada Selasa, 23 November lalu. "Masih dalam penyelidikan," ujarnya.

Deputi Penindakan KPK Inspektur Jenderal Karyoto juga tak berkomentar ihwal perkembangan penyelidikan korupsi bantuan sosial yang melibatkan Herman Hery dan Ihsan Yunus. Menurut seorang penegak hukum, Karyoto meminta bukti berubah dari kerugian negara menjadi perantara suap.

Hingga Sabtu, 27 November lalu, Herman Hery tak merespons permintaan wawancara *Tempo*. Ia hanya membaca pesan yang dikirim ke akun WhatsApp-nya. Surat konfirmasi juga sudah dikirim ke rumahnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan, dan ke DPR, tapi tak berbalas.

Selepas diperiksa KPK pada akhir April lalu, Herman mengatakan ia hadir di Gedung Merah Putih untuk mengklarifikasi kasus bantuan sosial yang mengaitkan namanya. Dia mengaku tak bisa meminta jatah proyek bantuan sosial, apalagi menekan koleganya di PDI Perjuangan, Juliari Batubara, untuk mendapatkan proyek itu.

"Sebagai orang Komisi Hukum, saya katakan kepada Juliari bahwa Presiden sudah *ngamuk* banget dalam penanganan Covid-19," ujarnya. "Dia hanya tanya ke saya, kira-kira apa jalan keluarnya? Saya jawab jalan keluarnya percepat realisasi bantuan sosial itu."

Herman Hery mengklaim sama sekali tak tahu ihwal proyek bantuan sosial Covid-19 mengurangi beban kemandekan ekonomi akibat pandemi. Namun sebuah foto pada 26 Mei lalu menunjukkan ia bersama anaknya, Stevano Rizki Adranacus, dan Ivo Wongkaren, sedang meninjau gudang pengemasan paket bantuan bahan pokok PT Bhanda Ghara Reksa di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di sana mereka berpose bersama Juliari Peter Batubara.

LINDA TRIANITA, ROSSENO AJI

Mandek di Kuningan

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi memutus bersalah lima terdakwa perkara bantuan sosial Covid-19. Namun penyelidikan kasus yang menyeret Menteri Sosial Juliari Peter Batubara itu masih menyimpan nama besar lain, yakni politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Herman Hery dan Ihsan Yunus, yang santer beredar di kalangan penegak hukum. Penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi malah jalan di tempat.

Para Terpidana

1. Juliari Peter Batubara
(Menteri Sosial)

Vonis:
12 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara, dan uang pengganti Rp 14,5 miliar subsider 2 tahun penjara.

Peran:
Memerintahkan pengumpulan upeti proyek bantuan sosial. Menurut hakim, Juliari menerima suap Rp 32,4 miliar dari sejumlah vendor melalui bawahannya.

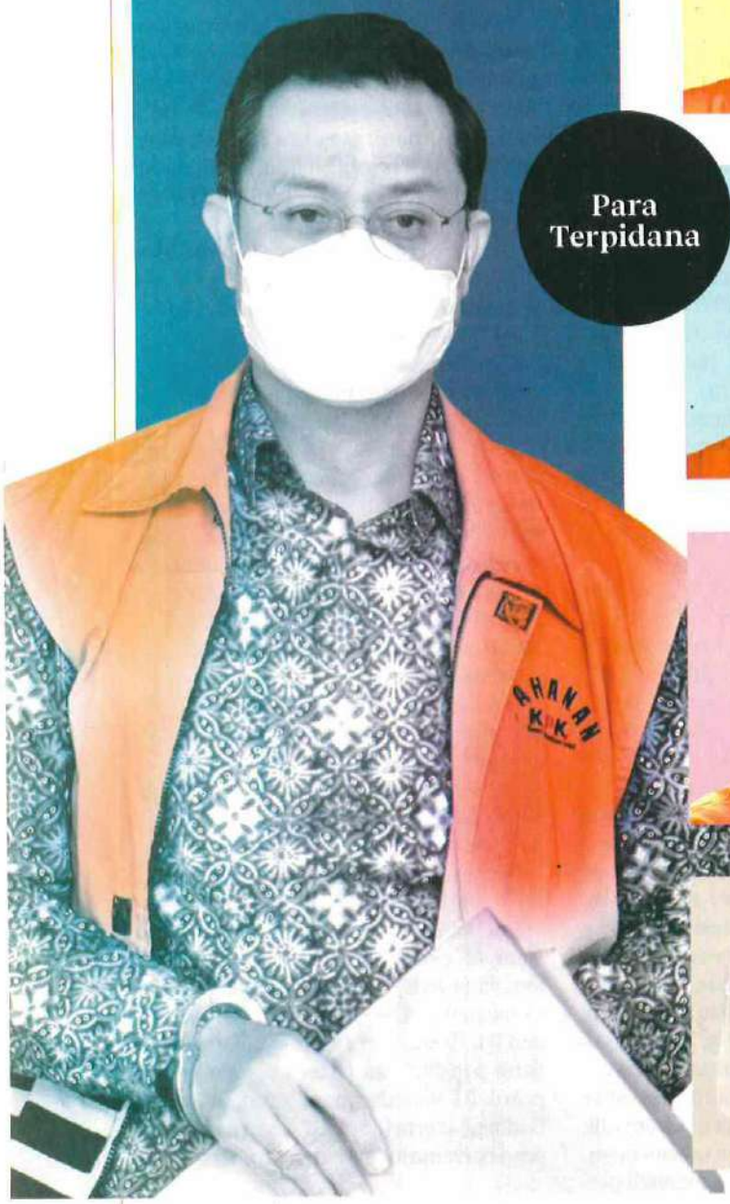

2. Matheus Joko Santoso (Pejabat Pembuat Komitmen)
Vonis: 9 tahun penjara dan denda Rp 450 juta
Peran: Menunjuk langsung perusahaan rekanan bantuan sosial. Ia juga pemilik PT Rajawali Parama Indonesia, yang ikut mengerjakan proyek.

3. Adi Wahyono (pelaksana tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial)
Vonis: 7 tahun penjara dan denda Rp 350 juta
Peran: Memungut *commitment fee* Rp 10 ribu untuk setiap paket bantuan sosial dari perusahaan penyedia bantuan atas perintah Juliari.

4 Ardian Iskandar Maddanatja
(Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama)
Vonis: 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta
Peran: Menyetor upeti bantuan sosial Rp 1,9 miliar kepada Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso

5. Harry van Sidabukke (pengusaha)
Vonis: 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta
Peran: Perantara proyek bantuan sosial Kementerian Sosial dengan PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude lewat orang kepercayaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ihsan Yunus.

Fakta Baru Persidangan

→ Dalam sidang dakwaan terhadap Juliari Batubara, **jaksa menyatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras serta Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazarudin** menerima uang Rp 200 juta dan Rp 1 miliar.

→ **Ada nama baru yang terlibat:** Galung, anggota tim audit Badan Pemeriksa Keuangan; dan Yonda, utusan petinggi Badan Pemeriksa Keuangan. Galung dan Yonda diduga menerima uang Rp 100 juta dan Rp 1 miliar dari Adi Wahyono. Jaksa menyebut nama keduanya dalam sidang tuntutan Matheus Joko Santoso.

→ PT Dwimukti Graha Elektrindo, perusahaan milik Herman Hery, anggota fraksi PDI Perjuangan dan mantan Ketua Komisi Hukum DPR, **menguasai proyek pengadaan tahap 3, 5, 6, dan 7 dengan total 1,5 juta paket lewat sejumlah perusahaan afiliasi.**

→ Agustri Yogasmara, yang menjadi perpanjangan tangan Ihsan Yunus—Wakil Ketua Komisi Sosial DPR—diduga **meminta komisi kepada PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude melalui Harry van Sidabukke** sebesar Rp 7 miliar secara bertahap.

Kluster Penyaluran Bantuan Sosial

1. Perusahaan yang terafiliasi dengan Herman Hery dan Ivo Wongkaren
2. Perusahaan yang terafiliasi dengan Ihsan Yunus, M. Rakyan Ikram, dan Agustri Yogasmara
3. Perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat di Kementerian Sosial
4. Perusahaan yang terafiliasi dengan kerabat Menteri Sosial Juliari Batubara

Penggeledahan

11 Januari 2021
→ Kantor PT Mesail Cahaya Berkat, Soho Capital SC-3209 Podomoro City, Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat.

12 Januari 2021
→ Rumah orang tua Ihsan Yunus di Jalan Raya Hankam, Cipayung, Jakarta Timur.

8 Januari 2021
→ Kantor PT Anomali Lumbung Artha, Gedung Patra Jasa, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
→ Kantor PT Famindo Meta Komunika, Gedung Patra Jasa, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

12 Januari 2021
→ Rumah Agustri Yogasmara, orang dekat Ihsan Yunus di Perumahan Rose Garden, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat.

8 Januari 2021
→ Kantor PT Dwimukti Graha Elektrindo (terafiliasi dengan Herman Hery), Jalan Panglima Polim, Nomor 28, Jakarta Selatan.

11 Januari 2021
→ Kantor PT Junatama Foodia Kreasindo, Jalan MPR III Dalam, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

NASKAH: RIKY FERDIANTO
SUMBER: PUSAT DATA DAN ANALISA TEMPO, WAWANCARA
FOTO: TEMPO/ IMAM SUKAMTO (JULIARI, MATHEUS, ADI, ARDIAN, HARRY)

"Hampir semua perusahaan yang ditunjuk dalam pengadaan bantuan sosial tidak memiliki kualifikasi. Seharusnya mereka tidak layak ditunjuk."

Anggota majelis hakim, **Joko Subagyo**, dalam sidang putusan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara

"Pelakunya bukan hanya level Menteri Sosial, tapi ada pihak-pihak lain yang belum terungkap. Dan orang-orang itu kedudukannya bukan di bawah level Juliari."

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, **Novel Baswedan**

"Saya tidak pernah ikut campur urusan perusahaan."

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, **Herman Hery**

"Partisipasi saya bukan pengadaan (paket bantuan sosial), tapi program."

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, **Ihsan Yunus**